



SIMAK  BPK RI

LAPORAN KINERJA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2022



INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 secara tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan kinerja pada Tahun 2022, yang penyusunannya didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja (IKU/IK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Dengan mendasarkan pada indikator kinerja tersebut, maka Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Selain untuk mengukur optimalisasi pelaksanaan kinerja Tahun 2022, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dipahami dengan baik dan dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang. Selain itu, diharapkan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan menjadi umpan balik bagi seluruh Pejabat Struktural dan para pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 27 Januari 2023

Kepala Perwakilan

M. Ali Asyhar

NIP 196909291996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
D. SUMBER DAYA.....	7
E. ISU STRATEGIS.....	14
BAB II - PERENCANAAN STRATEGIS.....	15
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	15
B. TARGET KINERJA.....	20
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. HASIL EVALUASI AKIP.....	25
B. CAPAIAN KINERJA	26
C. ANALISIS EFISIENSI.....	57
D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA.....	60
E. REALISASI ANGGARAN	60
F. INOVASI.....	62
G. PENGHARGAAN.....	64
BAB IV -PENUTUP.....	66
LAMPIRAN.....	v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)	13
Tabel 2 Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)	13
Tabel 3 Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan	21
Tabel 4 Rencana Aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	24
Tabel 5 Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	30
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir	31
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun	32
Tabel 8 Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020-2024	33
Tabel 9 Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020-2024	35
Tabel 10 Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020-2024	36
Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020-2024	39
Tabel 12 Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020-2024	40
Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020-2024	42
Tabel 14 Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020-2024	43
Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020-2024	45
Tabel 16 Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020-2024	47
Tabel 17 Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020-2024	49
Tabel 18 Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020-2024	51
Tabel 19 Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020-2024	52
Tabel 20 Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020-2024	54
Tabel 21 Budaya Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	60
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2022	61
Tabel 23 Dampak Inovasi dan Keterkaitan dengan Indikator Kinerja	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.....	4
Gambar 2 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024	18
Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024	19
Gambar 4 Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022	20
Gambar 5 Hasil Evaluasi SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021	25
Gambar 6 Tren Skor Kinerja Tahun 2020-2022.....	28

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, menyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam peraturan tersebut juga mengungkapkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Penerapan peraturan tersebut di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya didukung dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka diperlukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu satuan kerja pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI yang mengelola anggaran. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 merupakan cerminan dari prestasi kerja yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2022.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini adalah.

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan BPK RI Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, tugas pokok BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 616 menetapkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

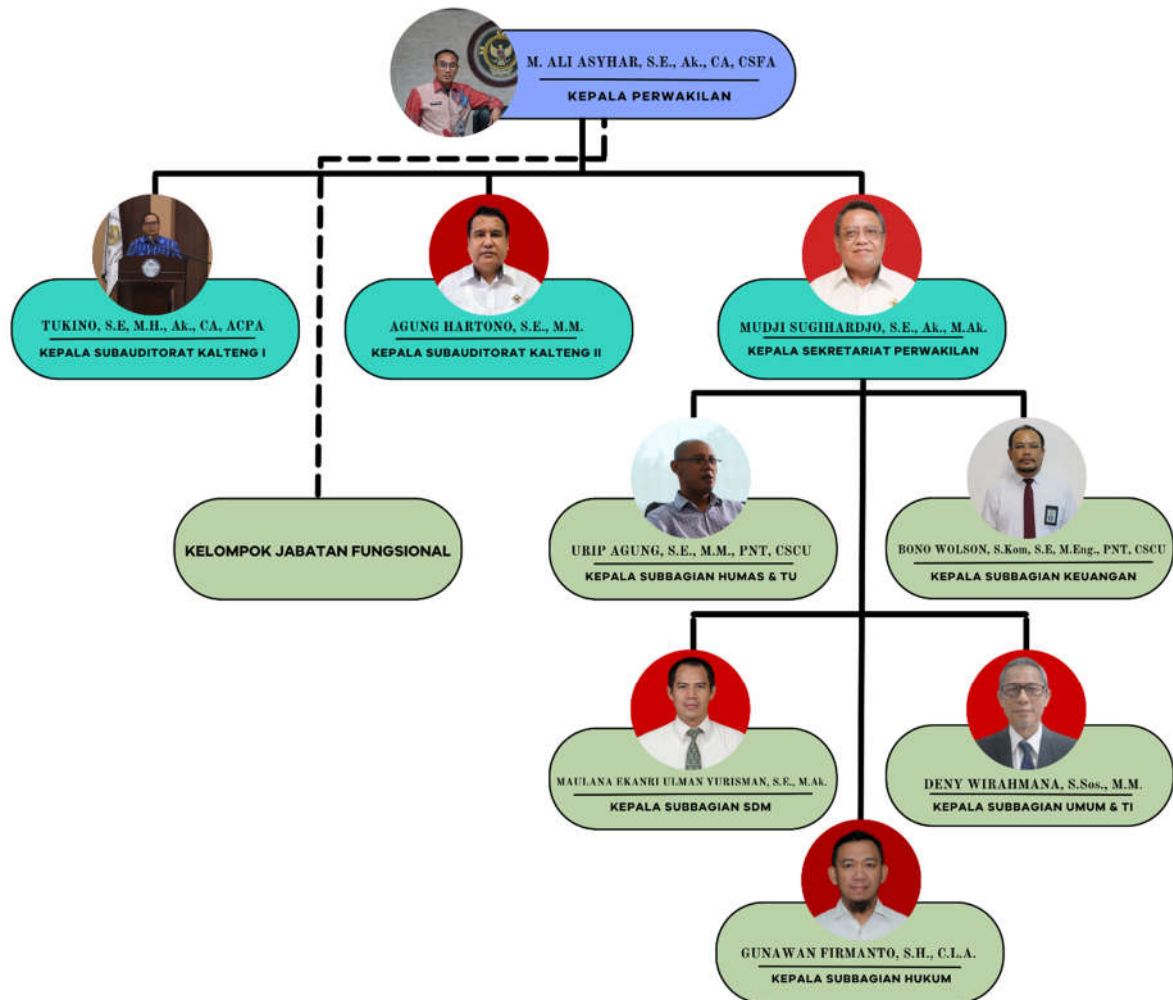
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK di Provinsi Kalimantan Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPK RI Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana

tertuang dalam pasal 615 pasal (1) yang menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI dan pasal (2) yang menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala.

Berikut struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

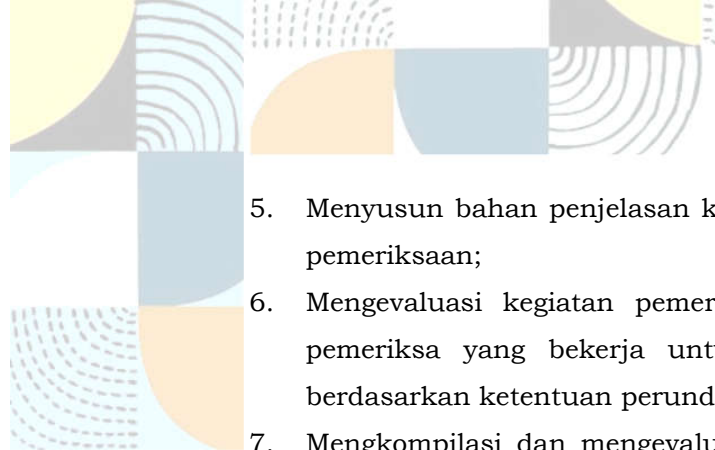
Adapun tugas dalam struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

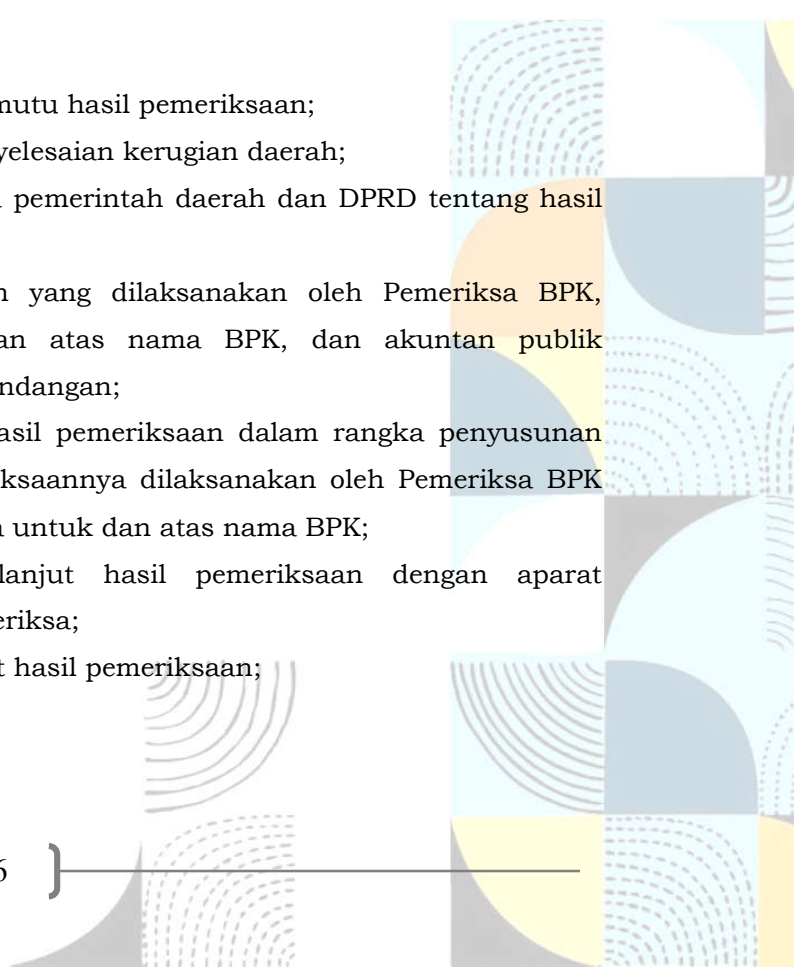
Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Subbagian Sumber Daya Manusia
Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi
Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
 - e. Subbagian Hukum
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Subauditorat Kalimantan Tengah I
Subauditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, BUMD , dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 1. Merumuskan rencana kegiatan;
 2. Mengusulkan tim pemeriksa;
 3. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;

- 
5. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 7. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 10. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 11. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
 12. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Subauditorat Kalimantan Tengah II

Subauditorat Kalimantan Tengah II mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, BUMD , dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1. Merumuskan rencana kegiatan;
 2. Mengusulkan tim pemeriksa;
 3. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 4. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 5. Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 6. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 7. Mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 8. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 9. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 

10. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
12. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

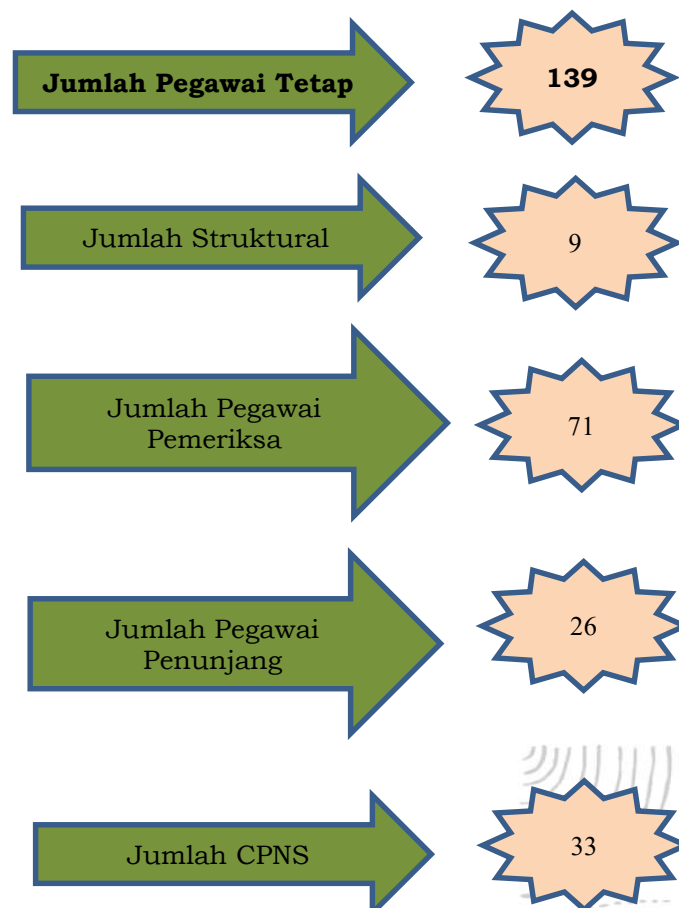
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

D. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2022 sebanyak 161 dengan profil demografi sebagai berikut.



Statistik Pegawai Tetap

II/a	:	0
II/b	:	0
II/c	:	7
II/d	:	1
Jumlah	:	8
III/a	:	68
III/b	:	31
III/c	:	5
III/d	:	15
Jumlah	:	119
IV/a	:	7
IV/b	:	3
IV/c	:	2
IV/d	:	0
IV/e	:	0
Jumlah	:	12
Jumlah Total	:	139

Menurut Golongan

Kepala Perwakilan	:	1
Kepala Sekretariat	:	1
Kepala Subauditorat	:	2
Kepala Subbagian	:	5
Jumlah	:	9
Jabatan Fungsional		
Pemeriksa Ahli Utama	:	0
Pemeriksa Ahli Madya	:	4
Pemeriksa Ahli Muda	:	13
Pemeriksa Ahli Pertama	:	54
Jumlah	:	71
Jabatan Fungsional Lainnya		
Arsiparis Ahli Pertama	:	1
Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	:	3
Analisis Kepegawaian Ahli Muda	:	2
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	:	1
Pranata Humas Ahli Pertama	:	1
Pranata Komputer Ahli Muda	:	1
Pranata Komputer Terampil	:	1
Jumlah	:	10
Jabatan Lainnya		
Analisis Protokol	:	2
Analisis Humas	:	2
Analisis Hukum	:	0
Analisis Keuangan	:	2
Analisis Barang Milik Negara	:	2
Pengelola Kepegawaian	:	1
Pengelola Keuangan	:	3
Pengelola Layanan Kehumasan	:	1
Pengelola Teknologi Informasi	:	1
Pranata Kearsipan	:	1
Pemelihara Sarana dan Prasarana	:	1
Administrasi Umum	:	33
Jumlah	:	49
Jumlah Total	:	139

Menurut Jabatan

PNS : 106
CPNS : 33
Jumlah : 139



Menurut Status
Kepegawaian

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	:	1
Sekretariat Perwakilan	:	4
Subauditorat Kalteng I	:	52
Subauditorat Kalteng II	:	52
Subbagian Keuangan	:	6
Subbagian Umum dan TI	:	9
Subbagian SDM	:	6
Subbagian Humas dan TU	:	7
Subbagian Hukum	:	2
Jumlah	:	139

Menurut Unit Kerja

S-3	:	0
S-2	:	16
S-1	:	110
D-IV	:	3
D-III	:	9
SLTA/SMK	:	1
Jumlah	:	139

Menurut Jenjang Pendidikan

> 10 Tahun	:	1
9 - 10 Tahun	:	2
7 - 8 Tahun	:	7
5 - 6 Tahun	:	13
3 - 4 Tahun	:	58
1 - 2 Tahun	:	21
< 1 Tahun	:	37
Jumlah	:	139

Menurut Lama Bertugas di
Kalteng



Perempuan : 69
 Laki-Laki : 70
Jumlah : 139

Menurut Jenis Kelamin

> 55 Tahun	:	0
51 - 55 Tahun	:	5
46 - 50 Tahun	:	9
41 - 45 Tahun	:	10
36 - 40 Tahun	:	17
31 - 35 Tahun	:	29
25 - 30 Tahun	:	63
< 25 Tahun	:	6
Jumlah	:	139

Menurut Usia

Hindu	:	0
Islam	:	110
Katolik	:	10
Protestan	:	19
Budha	:	0
Jumlah	:	139

Menurut Agama

Kawin	:	74
Belum Kawin	:	64
Duda	:	0
Janda	:	1
Jumlah	:	139

Menurut Status Perkawinan

Statistik Pegawai Tenaga Tidak Tetap

Jumlah Pegawai Tenaga Tidak Tetap

22

Pengamanan	:	13
Pengemudi	:	4
Perawat	:	1
Dokter	:	1
Resepsionis	:	1
Teknisi	:	2
Jumlah	:	22

Menurut Jabatan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah:	:	0
Sekretariat Perwakilan	:	0
Subauditorat Kalteng I	:	0
Subauditorat Kalteng II	:	0
Subbagian Keuangan	:	0
Subbagian Umum dan TI	:	19
Subbagian SDM	:	2
Subbagian Humas dan TU	:	1
Subbagian Hukum	:	0
Jumlah	:	22

Menurut Unit Kerja

S-1	:	5
D-IV	:	0
D-III	:	1
SLTA/SMK	:	16
Jumlah	:	22

← Menurut Jenjang Pendidikan

> 14 Tahun	:	5
13 - 14 Tahun	:	4
11 - 12 Tahun	:	1
9 - 10 Tahun	:	4
7 - 8 Tahun	:	1
5 - 6 Tahun	:	5
3 - 4 Tahun	:	0
1 - 2 Tahun	:	2
< 1 Tahun	:	0
Jumlah	:	22

← Menurut Lama Bertugas di Kalteng



Perempuan	:	3
Laki-Laki	:	19
Jumlah	:	22

← Menurut Jenis Kelamin

> 55 Tahun	:	1
51 - 55 Tahun	:	1
46 - 50 Tahun	:	4
41 - 45 Tahun	:	3
36 - 40 Tahun	:	7
31 - 35 Tahun	:	4
25 - 30 Tahun	:	2
< 25 Tahun	:	0
Jumlah	:	22

← Menurut Usia

Hindu	:	0
Islam	:	17
Katolik	:	0
Protestan	:	5
Budha	:	0
Jumlah	:	22

← Menurut Agama

Kawin	:	18
Belum Kawin	:	4
Duda	:	0
Janda	:	0
Jumlah	:	22

← Menurut Status Perkawinan

2. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPK RI Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, Pada Tahun 2022, setelah melalui proses revisi anggaran pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk kegiatan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) pada Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp8.555.039.000,00 (delapan milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan target 281 volume rincian output, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.U28	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	3.712.522.000	24 LHP
a.		<i>LHP Keuangan</i>	1.997.100.000	14 LHP
b.		<i>LHP Kinerja</i>	523.794.000	3 LHP
c.		<i>LHP DTT</i>	1.191.628.000	7 LHP
2	1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	258.439.000	147 LHP
3	1043.FAF.U76	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2.398.997.000	19 LHP
a.		<i>LHP Keuangan</i>	1.992.668.000	15 LHP
b.		<i>LHP Kinerja</i>	215.911.000	2 LHP
c.		<i>LHP DTT</i>	190.418.000	2 LHP
4	1043.FAF.059	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	497.859.000	1 LHP
5	1043.FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	374.510.000	30 Laporan
6	1043.FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	505.598.000	30 Laporan
7	1043.FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.779.000	1 Laporan
8	1043.FAF.174	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	618.849.000	12 Laporan
a.		<i>Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan</i>	114.873.000	
b.		<i>Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan</i>	447.870.000	
c.		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</i>	15.120.000	
d.		<i>Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan</i>	5.674.000	
e.		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD</i>	35.312.000	

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
9	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	178.986.000	2 Laporan
10	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	7.500.000	15 Laporan
Jumlah (1 s.d. 10)			8.555.039.000	281

Tabel 1 Rincian Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun Anggaran 2022

Pada Tahun 2022, setelah melalui proses revisi anggaran pagu anggaran untuk setjen dan penunjang BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) pada tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp14.438.678.000,00 (empat belas milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan target 155 volume rincian output, dengan rincian sebagai berikut.

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.230.500.000	20 Laporan
a		Melaksanakan Layanan Kehumasan	220.148.000	
b		Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia	225.142.000	
c		Melaksanakan Layanan Keuangan	305.953.000	
d		Melaksanakan Layanan Umum dan TI	228.917.000	
e		Melaksanakan Layanan Hukum	212.848.000	
f		Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	37.492.000	
2	1043.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	324.939.000	26 Unit
3	1043.EBB.951	Layanan Sarana Internal	398.955.000	125 Unit
4	1043.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	46.640.000	2 Unit
5	1043.EBA.994	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.437.644.000	1 Layanan
a		Gaji dan Tunjangan	7.633.659.000	
b		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.803.985.000	
a)		Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	687.731.000	
b)		Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	41.840.000	
c)		Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	179.300.000	
d)		Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	247.200.000	
e)		Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	3.286.812.000	
f)		Layanan Dukungan Sekretariat Perwakilan	361.102.000	
Jumlah (1 s.d. 5)			14.438.678.000	174

Tabel 2 Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) Tahun Anggaran 2022

E. ISU STRATEGIS

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024. Isu-isu strategis tersebut itu meliputi:

- a. Masih adanya gugatan terhadap LHP BPK yang berisiko menurunkan reputasi BPK;
- b. Koordinasi penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara belum optimal, sehingga kasus kerugian negara yang sudah dilaporkan tidak dapat segera diputuskan dan masih banyak kasus Tuntutan Perbendaharaan yang belum terpantau dan dilaporkan;
- c. Perlunya peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat *IT Driven* untuk mendukung proses bisnis sesuai hasil *peer review*;
- d. Pengelolaan Pendidikan dan pelatihan (diklat) BPK masih menghadapi permasalahan, antara lain: kualitas dan kuantitas SDM (pengelola dan fasilitator) belum mencukupi, kurikulum belum *link and match*, media pembelajaran belum komprehensif, stakeholder belum sinergis, dan tata kelola belum optimal;
- e. BPK belum sepenuhnya mendokumentasikan dan mereplikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung peningkatan nilai tambah organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB

A. PERENCANAAN STRATEGIS

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menyesuaikan periode Renstra BPK 2020-2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengingat periode Renstra sebelumnya memiliki tenggat waktu satu tahun dibandingkan dengan RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 disusun selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 menjabarkan rancangan rencana lima tahunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 sebagai berikut.

VISI

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”

Melalui visi ini BPK akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian, BPK akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi sebagai berikut.

MISI

- (1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut, yaitu.

NILAI DASAR

1. Independensi, yaitu BPK menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan. BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;
2. Integritas, yaitu BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;
3. Profesionalisme, yaitu BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan sebagai berikut.

TUJUAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2020-2024

“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat.”

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

**SASARAN STRATEGIS
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2020-2024**

“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

a. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

b. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua

akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Strategi ini merupakan bentuk perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan. BPK juga selalu berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:



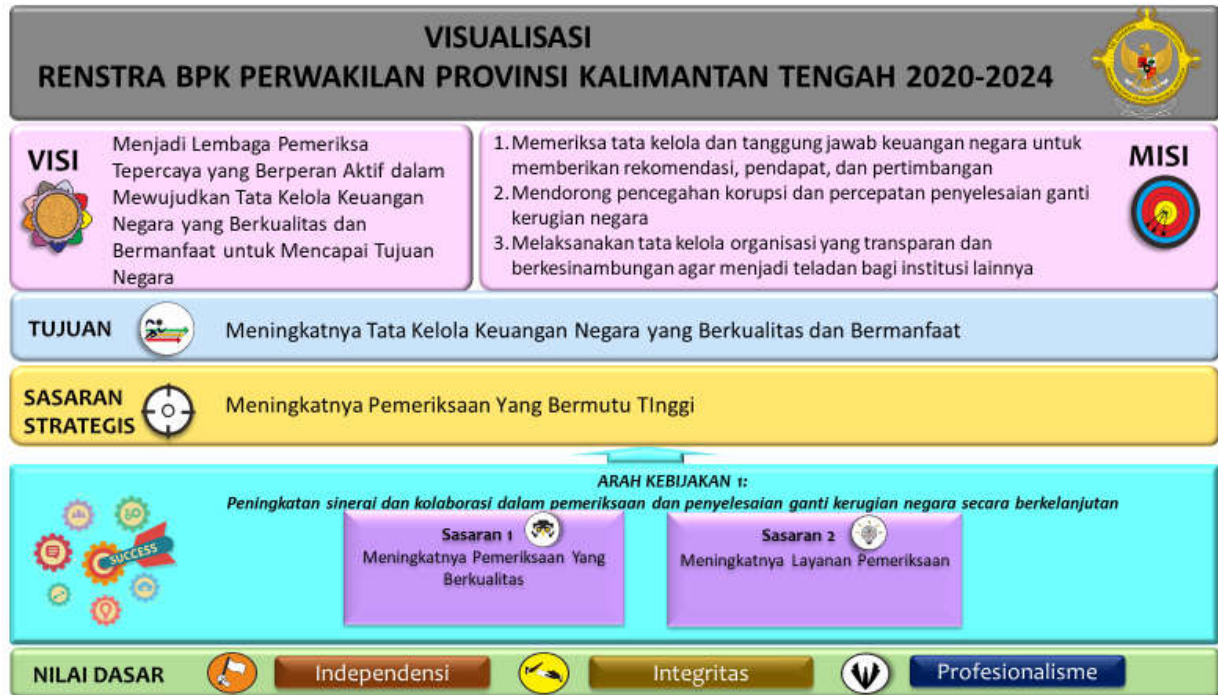
Gambar 2 Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024

Sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unit kerja dibawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI mendukung strategi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif.

Adapun sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”. Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut maka BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dua sasaran sebagai berikut.

Sasaran 1 Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas
Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Berikut visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024 sebagai berikut.



Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2024

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan indikator-indikator kinerja utama sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- 2) Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
- 3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ;
- 4) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
- 5) Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
- 6) Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
- 7) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- 8) Hasil Evaluasi AKIP;
- 9) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- 10) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- 11) Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
- 12) Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
- 13) Tingkat Kinerja Anggaran.

B. TARGET KINERJA

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja beserta target pencapaian Indikator Kinerja. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2022 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Eselon II dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI pada Desember 2020 yang diketahui oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota VI BPK.

Berikut Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022:



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

ESELON I
SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

ESELON II
SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

SASARAN

Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp21.454.636.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp8.481.655.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp12.982.981.000	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Keuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,



Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFA.

Pihak Pertama,



Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Diketahui oleh:
Anggota VI BPK,



Nyoman Adhi Sugadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Wakil Ketua BPK,



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFA., QGIA., CGCAE.

Ketua BPK,



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE., QGIA.

Gambar 4 Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Dalam pelaksanaannya anggaran Sasaran Kegiatan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 mengalami perubahan hal ini dikarenakan karena adanya penambahan anggaran

BA BUN, Belanja Pegawai dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Anggaran		Indikator Kinerja	Target	
	Semula	Menjadi			
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp21.464.636.000,-	Rp22.993.717.000,-	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp8.481.655.000,-	Rp8.555.039.000,-	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp12.982.981.000,-	Rp14.438.678.000,-	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
			IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
			IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
			IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
			IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
			IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
			IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
			IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
			IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
			IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
			IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%

Tabel 3 Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

2. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian masing-masing indikator yang telah divalidasi secara periodik yang terdapat dalam Rencana Aksi. Berikut rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut.

	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); 2. Melaksanakan revidi berjenjang dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan; 3. Melaksanakan <i>cross review</i> atas penyusunan LHP untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi LHP yang diterbitkan; 4. Pembentukan Tim revidi Opini untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan opini BPK atas LK entitas; 5. Pembentukan Tim Perencanaan Pemeriksaan LKPD; 6. Pembentukan Tim Revidi Infrastruktur untuk meningkatkan kualitas temuan terkait konstruksi; 7. Melaksanakan dokumentasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan sesuai pedoman yang berlaku dan melakukan penyimpanan secara elektronik.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2022; 2. Melakukan Sinkronisasi tujuan pemeriksaan dengan harapan pemeriksaan atas seluruh pemeriksaan yang dilaksanakan; 3. Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan; 4. Menyusun kesimpulan pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan/harapan penugasan; 5. Pembentukan Tim revidi Opini untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan opini BPK atas LK entitas; 6. Pembentukan Tim Revidi Infrastruktur untuk meningkatkan kualitas temuan terkait konstruksi;
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL dan melakukan pembahasan dengan <i>auditee</i>; 2. Melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL secara berkala; 3. Melakukan komunikasi dengan <i>auditee</i> untuk pemutakhiran penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; 4. Penyusunan <i>action plan</i> atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang disertai dengan informasi dokumen TL agar rekomendasi dapat dikategorikan sesuai.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional; 2. Menyusun rencana pemeriksaan sesuai dengan tematik nasional yang ditetapkan di BPK; 3. Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan; 4. Menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan tematik nasional.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan;

Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan jika topik pemeriksaan cukup signifikan; 3. Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	<p>100%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal; 2. Menyusun rencana pemeriksaab sesuai dengan tematik lokal yang ditetapkan; 3. Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan; 4. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) terkait pelaksanaan tematik lokal; 5. Menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	<p>Sangat Memuaskan (5,00)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD; 2. Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP; 3. Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi, misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja; 4. Membuat pernyataan independensi untuk seluruh pelaksanaan pemeriksaan; 5. Melakukan sosialisasi layanan aplikasi <i>live chat</i> sebagai sarana pengaduan <i>stakeholders</i> terhadap nilai IIP pemeriksa.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	<p>A (88,00)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2022; 2. Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; 3. Menjadikan dasar evaluasi tahun sebelumnya sebagai perbaikan di tahun berjalan.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	<p>97%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai; 2. Menginventarisasi masalah pemanfaatan TI dan mengomunikasikan masalah tersebut dengan Biro TI serta melakukan pendampingan kepada pegawai.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	<p>100%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun <i>Best Practice</i> Tahun 2022; 2. Menyusun replikasi <i>best practice</i> Tahun 2022; 3. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan secara berkala dan berkesinambungan.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	<p>Memuaskan (3,80)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; 2. Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat <i>entry briefing</i>; 3. Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak <i>auditee</i>; 4. Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja		Target	Rencana Aksi
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan Diklat; 2. Mengajukan proposal penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan pada Kantor Perwakilan; 3. Menginventarisir tingkat pemenuhan jam diklat dan mendorong pegawai untuk memenuhi jam diklatnya. 4. Menyusun laporan monitoring jam diklat pegawai.
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja; 2. Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan; 3. Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah; 4. Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK; 5. Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja satker dengan Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA. 2021 dan Kebijakan TA.2021.

Tabel 4 Rencana Aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

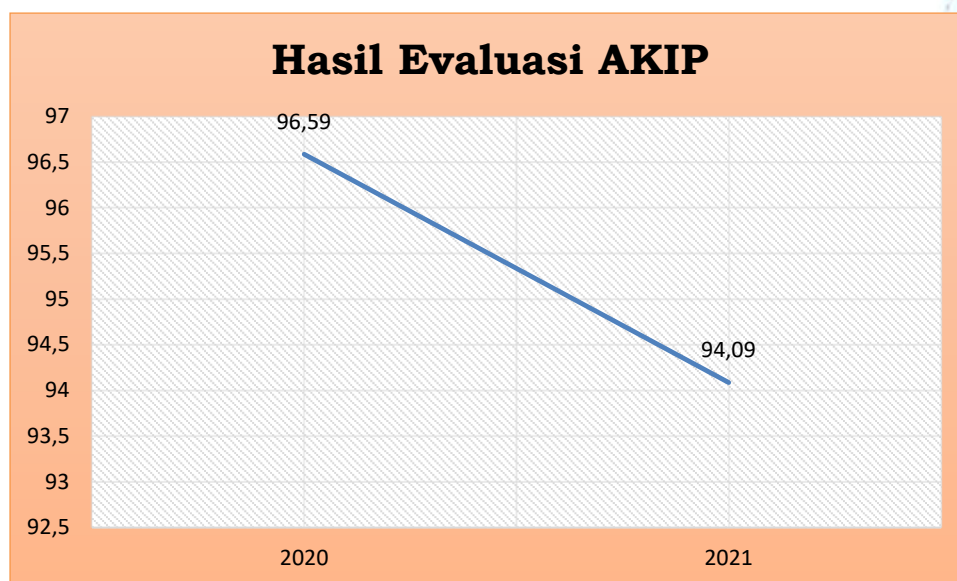
A. HASIL EVALUASI AKIP

Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Inspektorat Utama (Itama) telah melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, evaluasi ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen Akuntabilitas Kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2021 mendapatkan nilai sebesar **94,09** dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**. Perolehan nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 yang mendapatkan nilai sebesar **96,59** dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**.



Gambar 5 Hasil Evaluasi SAKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021

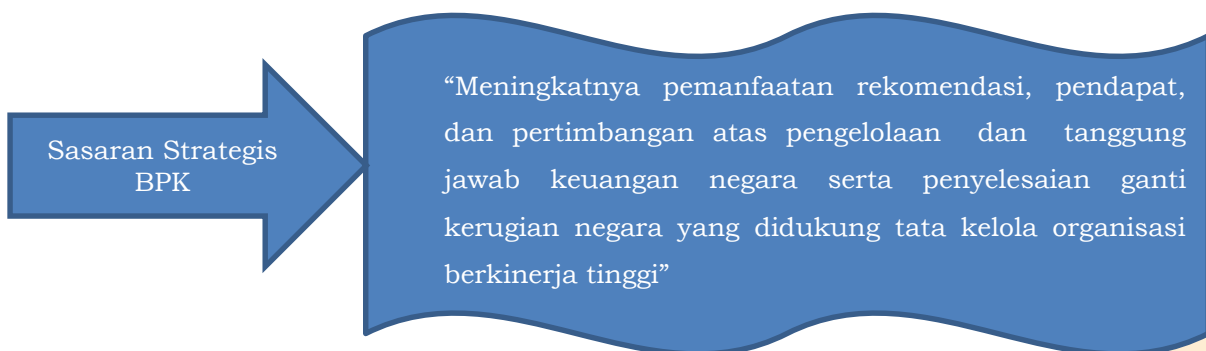
Penurunan ini dikarenakan masih adanya hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu.

1. Monitoring pencapaian target kinerja baru dilakukan sampai dengan level Eselon II atau belum belum dilakukan untuk Eselon III, IV dan Individu;
2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi besaran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, namun belum menyajikan besaran efisiensi penggunaan sumber daya manusia, informasi teknologi, dan sarana prasarana dan belum dikuantifikasikan penyajiannya;
3. Masih terdapatnya target tahun berjalan yang tidak tercapai dan masih tidak lebihbaik dari capaian kinerja tahun sebelumnya.

Atas hasil evaluasi tersebut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berusaha meningkatkan kinerja dengan berkoordinasi dengan Direktorat PSMK, Inspektorat Utama, Biro Teknologi dan Informasi, Biro Sumber Daya Manusia dan pihak terkait lainnya dalam melakukan langkah-langkah perbaikan.

B. CAPAIAN KINERJA

Renstra BPK 2020-2024 membuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi BPK. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024.



Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI merupakan satuan kerja eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran program dalam Perjanjian Kinerja AKN VI sebagai berikut.



Sasaran Strategis
AKN VI

“Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”

Dalam mendukung sasaran strategis AKN VI tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

Sasaran Strategis
BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan
Tengah

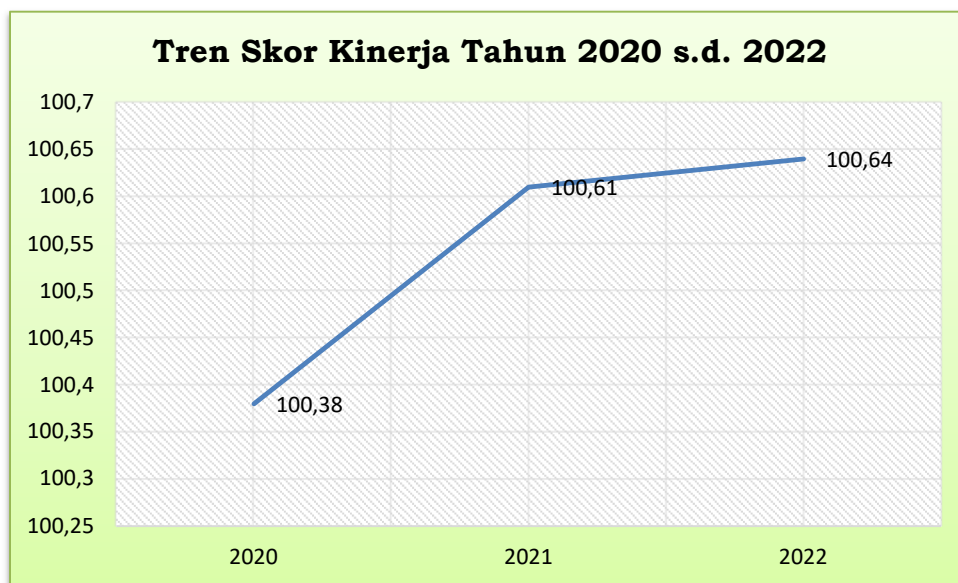
“Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”

Pengelolaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bersama Direktorat PSMK melakukan pengukuran secara bertahap dari mulai proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pencapaian Sasaran Strategis ini dinilai melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka capaian kinerja Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan beberapa kegiatan meliputi.

- a. Melakukan validasi atas target kinerja Tahun 2022;
- b. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2022;
- c. Melakukan monitoring pencapaian kinerja Tahun 2022;
- d. Melakukan inventarisasi atas permasalahan pencapaian kinerja pada tahun berjalan; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendorong pencapaian kinerja dan mengatasi kendala yang dihadapi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 memperoleh skor capaian kinerja sebesar **100,64**. Skor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar **100,61**. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 6 Tren Skor Kinerja Tahun 2020-2022

Dari gambar diatas menunjukkan kenaikan skor kinerja jika dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencapaian kinerja membawa dampak peningkatan atas skor kinerja Tahun 2022.

Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diukur berdasarkan pencapaian atas 13 (tiga belas) IKU yang disajikan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Tahun 2022			
		Target	Realisasi	Capaian	Skor
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90,63%	90,63%	90,63
1.1	Hasil QA dan QC Satker (Bobot 40%)		100%		
1.2	Hasil Evaluasi EPP (Bobot 50%)		81,25%		
1.3	Hasil Reviu Itama (Bobot 10%)		100		
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100
2.1	Jumlah LHP yang Simpulannya sesuai dengan harapan penugasan		10		
2.2	Jumlah LHP yang diterbitkan		10		
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,16%	113,55%	105
3.1	Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti		12.456		
3.2	Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses		1.989		

Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Tahun 2022			
		Target	Realisasi	Capaian	Skor
3.3	Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti		206		
3.4	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		142		
3.5	Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee		14.793		
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,90%	100,90%	100,9
4.1	Realisasi pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya		3		
4.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/signifikan lainnya		3		
4.3	Alokasi penambahan skor		0,90		
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,14%	100,14%	100,14
5.1	(REF) Jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK, yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait		1		
5.2	Alokasi penambahan skor		0,14		
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,46%	100,46%	100,46
6.1	Realisasi pemeriksaan tematik lokal		1		
6.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal		1		
6.3	Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat		0,46		
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,45)	89%	89
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (94,09)	106,92%	105
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	98,95%	102,01%	102,01
9.1	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (Bobot 20%)		100%		
9.2	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (Bobot 15%)		99,99%		
9.3	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (Bobot 20%)		100%		
9.4	Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP (Bobot 20%)		94,74%		
9.5	Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL (Bobot 25%)		100%		
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	120%	120%	105
10.1	Tingkat Penyusunan <i>Innovative Practice</i> (Bobot 50%)		120%		

Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Tahun 2022			
		Target	Realisasi	Capaian	Skor
10.1.1	Jumlah usulan <i>Best Practice</i> yang diterima atau Jumlah <i>Best Practice</i> yang diterapkan		2		
10.1.2	Jumlah usulan <i>Best Practice</i> yang diajukan atau Jumlah <i>Best Practice</i> yang direncanakan untuk diterapkan		1		
10.2	Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (Bobot 50%)		120%		
10.2.1	Jenis Aktivitas MP yang dilaksanakan		6		
10.2.2	Jenis Aktivitas MP yang direncanakan untuk dilaksanakan (dinyatakan dalam Rencana Aksi)		4		
	(REF) Jumlah aktivitas MP yang dilaksanakan		92		
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,99)	105%	105
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100
12.1	Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat		106		
12.2	Jumlah seluruh pegawai		106		
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	91,81%	104,33%	104,33
13.1	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) (Bobot 60%)		86,49%		
13.2	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) (Bobot 40%)		99,79%		
Skor Kinerja					100,64

Tabel 5 Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Secara keseluruhan, pencapaian skor kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Terdapat dua Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu.
 - a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
 - b. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.
2. Terdapat tiga Indikator Kinerja sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu.
 - a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
 - b. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.
3. Terdapat delapan Indikator Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 - b. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
 - c. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan;
 - d. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
 - e. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP;

- f. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- g. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- h. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
- i. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut.

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi			
			Tahun 2022 (4)	Tahun 2021 (5)	Tahun 2020 (6)	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90,63%	90,63%	86,67%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,16%	83,11%	85,32%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,90%	100,38%	100,89%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,14%	100%	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,46%	100,39%	100%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,45)	Sangat Memuaskan (4,40)	Sangat Memuaskan (4,42)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (94,09)	AA (96,59)	AA (94,39)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	98,95%	99,66%	99,16%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	120%	170,83%	200%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,99)	Sangat Memuaskan (4,08)	Memuaskan (3,96)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%	91,81%	91,78%	92,62%

Tabel 6 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Selanjutnya perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut.

Indikator Kinerja	Target Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	
	2020	2021	2022	2023	2024			
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	90,63%	90,63%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	85,16%	113,55%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,90%	100,90%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,14%	100,14%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,46%	100,46%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,45	89%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	AA (94,09)	104,49%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	98,95%	98,95%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,99	105%
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	91,81%	103,51%

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja selama Tahun 2022 secara keseluruhan sebagai berikut.

IKU 1

Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Utama.

Hasil QA dan QC

Pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP

Evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Hasil Reviu Utama

Penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara

Perkembangan capaian IKU 1 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	86,67%	90,63%	90,63%	-	-
Capaian Realisasi	86,67%	90,63%	90,63%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	+3,96	-	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	86,67%	90,63%	90,63%	-	-

Tabel 8 Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020-2024

Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar 90,63% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 90,63%. Realisasi ini masih dibawah target yang ditetapkan Tahun 2022. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan atas Kualitas LHP yang diterbitkan.

Pengukuran IKU ini melalui tiga sub IKU yaitu.

1. Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC Satker (bobot 40%) dengan realisasi sebesar 100%;
2. Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi LHP (bobot 50%) dengan realisasi sebesar 81,25%;
3. Sub IKU 1.3 tentang Hasil Reviu Itama (bobot 10%) sebesar 100%.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) atas 25 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Pengendalian mutu (*Quality Control*) dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya. Pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan standar dan praktik terbaik internasional dalam pemeriksaan, serta menjadi dasar penilaian atau kriteria atas mutu pemeriksaan untuk kegiatan sebelum sampai dengan setelah pemeriksaan dilakukan.

Selain itu capaian hasil evaluasi LHP yang dilakukan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) sebesar 81,25%. Capaian tersebut terdiri atas tingkat konsistensi atas LHP sebesar 62,50% (terdapat 6 LHP dari 16 LHP yang di evaluasi terdapat temuan konsistensi) dan tingkat akurasi LHP sebesar 93,75% (terdapat 1 LHP dari 16 LHP yang di evaluasi terdapat temuan akurasi).

Adapun capaian hasil reviu Itama yaitu sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan telah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Realisasi Tahun 2022 sama dengan realisasi Tahun 2021 yaitu sebesar 90,63% atau tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih adanya temuan konsistensi dan akurasi atas LHP yang diterbitkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya untuk meningkatkan pencapaian namun capaian masih dibawah target yang diharapkan. Untuk perbaikan tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus mengevaluasi pencapaian dan mengoptimalkan aktivitas yang telah direncanakan yang tertuang dalam rencana aksi.

Dengan demikian, IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan 2022.

Realisasi IKU 1 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 90,63 % atau belum memenuhi target yang diharapkan pada Tahun 2024. Untuk kedepannya diharapkan capaian ini dapat ditingkatkan hingga Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berusaha meningkatkan kualitas revidasi hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

IKU 2

Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Perkembangan capaian IKU 2 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	-	-
Capaian Realisasi	100%	100%	100%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-	-	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	-	-

Tabel 9 Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020-2024

Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2022 sebesar 100% dari target 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan laporan evaluasi Direktorat Evaluasi dan Perencanaan Pemeriksaan (EPP) bahwa simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan 3 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan 7 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100% atau telah memenuhi target yang diharapkan pada Tahun 2024. Diharapkan pencapaian ini dapat dipertahankan dengan meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan setiap tahunnya.

IKU 3

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU 3 merupakan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Perkembangan capaian IKU 3 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	85,32%	83,11%	85,16%	-	-
Capaian Realisasi	113,76%	110,81%	113,55%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-1,40	-2,21	+2,05	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	113,76%	110,81%	113,55%	-	-

Tabel 10 Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020-2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebesar 85,16% dari target 75% yang ditetapkan pada Tahun 2022 sehingga

capaian realisasi sebesar 113,55%. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi Tahun 2021. Hal ini menunjukkan komitmen dan peran aktif entitas dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Peningkatan capaian ini diukur berdasarkan realisasi Sub IKU berikut.

- a. Sub IKU 3.1 yaitu jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 12.456;
- b. Sub IKU 3.2 yaitu jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti sebesar 1.989;
- c. Sub IKU 3.3 yaitu jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 206;
- d. Sub IKU 3.4 yaitu jumlah Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebesar 142;
- e. Sub IKU 3.5 yaitu jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee* sebesar 14.793.

Peningkatan capaian ini disebabkan hal-hal sebagai berikut.

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan periode bulanan;
2. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
3. Komunikasi dan koordinasi intensif dilakukan dengan entitas dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat meningkatkan capaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ditahun selanjutnya diantaranya yaitu.

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan mengevaluasi permasalahan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan atau yang berlarut-larut melalui program percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah dengan membuat komitmen pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada setiap periode.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 113,55%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah optimis dapat memenuhi target sampai Tahun 2024 dengan terus berupaya untuk mempertahankan capaian ini dengan melakukan evaluasi atas pencapaian dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam pencapaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah merealisasikan anggaran sebesar Rp352.350.670,- atau 94,08% dari anggaran sebesar Rp374.510.000,- yang dialokasikan Tahun 2022. Realisasi ini atas Rincian Output (RO) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan.

IKU 4

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator kinerja ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

Perkembangan capaian IKU 4 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,89%	100,38%	100,90%	-	-
Capaian Realisasi	100,89%	100,38%	100,90%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-0,51	+0,52	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,89%	100,38%	100,90%	-	-

Tabel 11 Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional sebesar 100,90% dari target 100% yang ditetapkan pada Tahun 2022. Realisasi ini diatas target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Hal ini menunjukkan peran aktif keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemeriksaan tematik nasional.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tiga pemeriksaan tematik nasional yaitu.

1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Pelaksanaan Aksi Percepatan Implementasi Kebijakan Satu Peta, Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Implementasi E-Payment dan E-Katalog Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi terkait Lainnya;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Efektivitas Pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur dalam Penyediaan Akses Air Minum dan Sarana Prasarana Sanitasi Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I Tahun 2022; dan
3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Katingan dan Instansi Terkait Lainnya.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 4 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100,90%. Realisasi ini telah melebihi target yang diharapkan pada Tahun 2024. Adapun upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mempertahankan atau meningkatkan IKU ini yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan. Tema pemeriksaan tematik nasional yang

akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan ditetapkan pimpinan BPK. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Dukungan anggaran untuk pencapaian IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional sebesar Rp760.357.430,- atau 98,69% dari anggaran sebesar Rp770.454.000,- yang dialokasikan Tahun 2022. Realisasi ini dihitung berdasarkan keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas tiga pemeriksaan tematik nasional baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan terinci.

IKU 5

Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Sekretariat Jenderal. Satuan Kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Perkembangan capaian IKU 5 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100,14%	-	-
Capaian Realisasi	100%	100%	100,14%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-	+0,14	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100,14%	-	-

Tabel 12 Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020-2024

Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 sebesar 100,14% dari target 100% atau diatas target yang telah ditetapkan. Realisasi IKU ini lebih baik dari realisasi Tahun 2021. Capaian ini atas keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemeriksaan investigatif yang dilaksanakan oleh Auditorat Investigasi.

Realisasi ini berdasarkan keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Budidaya Tanaman Jambu Kristal pada Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100,14% atau telah melebihi target yang diharapkan. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pencapaian IKU ini BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk dapat responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

Dukungan anggaran atas IKU ini dikelola oleh Auditorat Utama Investigasi selaku koordinator pemeriksaan investigatif.

IKU 6

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's

Perkembangan capaian IKU 6 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,39%	100,46%	-	-
Capaian Realisasi	100%	100,39%	100,46%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	+0,39%	+0,07	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100,39%	100,46%	-	-

Tabel 13 Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020-2024

Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada Tahun 2022 sebesar 100,46% dari target 100% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Hal ini menunjukkan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam pemeriksaan tematik lokal setiap tahunnya.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terlibat dalam satu pemeriksaan tematik lokal yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Atas pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mendapat penambahan alokasi skor sebesar 0,46%.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU 6 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 100,46% atau telah memenuhi target yang diharapkan pada Tahun 2024. Untuk meningkatkan dan mempertahankan IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya berupaya menyusun rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'S.

Dukungan anggaran atas pencapaian IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal sebesar Rp184.541.467,- atau 99,02% dari anggaran sebesar Rp186.363.000,- yang dialokasikan pada Tahun 2022. Realisasi ini berdasarkan realisasi objek pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan terinci tematik lokal.

IKU 7

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei oleh pihak independen dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Untuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, perlu dukungan dari seluruh unsur pegawai yang ada di dalam organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk memahami visi, misi dan nilai dasar BPK sebagai bahan yang melekat pada dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perkembangan capaian IKU 7 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 7		Tahun			
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,42	4,40	4,45	-	-
Capaian Realisasi	88,40%	88%	89%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-0,34	-0,02	+0,05	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	88,40%	88%	89%	-	-

Tabel 14 Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020-2024

Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022 sebesar 4,45 dari target 5,00 yang ditetapkan pada Tahun 2022 sehingga capaian realisasi sebesar 89%. Berdasarkan tabel tersebut realisasi ini mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Namun demikian, realisasi IKU 7 pada Tahun 2022 masih dibawah target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak dari proses internalisasi kepada pegawai tentang pemahaman visi, misi, implementasi nilai-nilai dasar, dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan masih kurang.

Atas realisasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan terus mendorong para pegawai untuk meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, mengadakan *coaching* dan mentoring kepada pegawai, agar nilai dasar BPK bisa lebih dipahami dan dimaknai, serta mengintegrasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai sehari-hari.

Persentase realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sebesar 89% dari target Tahun 2024 atau belum memenuhi target Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk terus mendorong pencapaian IKU ini dengan mengoptimalkan pembinaan pegawai tentang pemahaman visi, misi dan implementasi nilai-nilai dasar.

IKU 8

Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK.

Sesuai Permenpan RB nomor 12 tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK

Perkembangan capaian IKU 8 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
Realisasi	AA (94,39)	AA (96,59)	AA (94,09)	-	-
Capaian Realisasi	109,76%	111,02%	106,92%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	+5,49	+2,2	-2,5	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	104,82%	107,26%	104,49%	-	-

Tabel 15 Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 sebesar 94,09 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dari target 88,00 dengan kategori A (Memuaskan) sehingga capaian realisasi sebesar 106,92%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, realisasi ini mengalami penurunan namun masih diatas target Tahun 2022. Penurunan ini dikarenakan masih adanya hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu.

1. Monitoring pencapaian target kinerja baru dilakukan sampai dengan level Eselon II atau belum dilakukan untuk Eselon III, IV dan Individu;
2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi besaran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan, namun belum menyajikan besaran efisiensi penggunaan sumber daya manusia, informasi teknologi, dan sarana prasarana dan belum dikuantifikasikan penyajiannya;
3. Terdapat dua target Tahun 2021 yang tidak tercapai yaitu IKU 1 dan IKU 7;
4. Terdapat delapan capaian kinerja tahun berjalan yang tidak lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 7, IKU 10, IKU 12 dan IKU 13.

Atas hasil evaluasi tersebut, untuk perbaikan pencapaian tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan sesuai dengan rekomendasi Itama perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk melaksanakan monitoring pencapaian kinerja eselon III, eselon IV dan individu secara berkala;

2. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan untuk setiap indikator kinerja;
3. Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan agar lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

Persentase realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 jika dibandingkan target Tahun 2024 sebesar 104,49% atau telah melebihi target Tahun 2024. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan capaian target setiap tahunnya dengan terus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan.

IKU 9

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL)

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan data (*updating*) data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan *log* akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan *log* akses aplikasi SiAP aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa pada yang masuk dalam Surat Tugas Pemeriksaan dalam aplikasi SiAP yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan,

pengisian HP3, revidi, dan pelaporan (mis. temuan, KHP, LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perkembangan capaian IKU 9 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	100%
Realisasi	99,16%	99,66%	98,95%	-	-
Capaian Realisasi	104,38%	103,81%	102,01%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	+0,17	+0,5	-0,71	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,16%	99,16%	98,95%	-	-

Tabel 16 Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 sebesar 98,95% dari target 97% sehingga capaian realisasi sebesar 102,01%. Realisasi ini masih diatas target Tahun 2022. Namun realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya formulasi perhitungan yang berbeda dengan tahun sebelumnya dimana terdapat pembaharuan instrumen pengukuran sehingga untuk pengoptimalan realisasi, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memerlukan penyesuaian dalam mendorong pemanfaatan teknologi dan informasi di dalam lingkungan internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengukuran realisasi ini tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 98,95% dengan rincian Sub IKU sebagai berikut.

- a. Realisasi Sub IKU 9.1 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (bobot 20%) sebesar 100%;
- b. Realisasi Sub IKU 9.2 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (bobot 15%) sebesar 99,99%;

- c. Realisasi Sub IKU 9.3 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (bobot 20%) sebesar 100%;
- d. Realisasi Sub IKU 9.4 Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP (bobot 20%) sebesar 94,74%;
- e. Realisasi Sub IKU 9.5 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL sebesar 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada Tahun 2022 jika dibandingkan target Tahun 2024 sebesar 98,95% atau belum memenuhi target Renstra Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi setiap tahunnya dengan meningkatkan kesadaran pegawai baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun dengan melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah serta membuka layanan tanya jawab dan bantuan konsultasi tingkat pemanfaatan TI. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

IKU 10

Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Innovative Practice menekankan pada inovasi/kebaruan/update atas *Best Practice* yang ada, dan dapat direalisasikan melalui:

1. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best Practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update;
2. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/update atas BP yang diimplementasi. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *review* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan,

komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Perkembangan capaian IKU 10 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

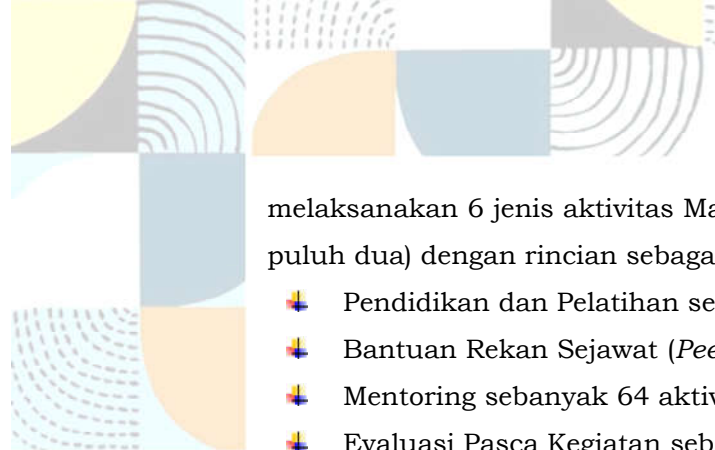
IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	200%	170,83%	120%	-	-
Capaian Realisasi	200%	170,83%	120%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-29,17	-50,83	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	200%	170,83%	120%	-	-

Tabel 17 Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020-2024

Realisasi IKU 10 Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 sebesar 120% dari target 100% atau diatas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas realisasi IKU ini mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021. Hal ini dikarenakan perbedaan formulasi penghitungan pengukuran IKU yang berbeda. Namun demikian, terjadi peningkatan jumlah aktivitas manajemen pengetahuan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022.

Adapun pencapaian realisasi ini berdasarkan atas realisasi Sub IKU berikut.

- a. Realisasi Sub IKU 10.1 Tingkat Penyusunan *Innovative Practice* (bobot 50%) sebesar 120%. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Kalimantan Tengah menyusun *best practice* yang berjudul "**Fitur Manajemen Pengetahuan dalam Portal "SATPAM RUJAB"**" dan menerapkan *best practice* yang berjudul "**Pemanfaatan Portal EPP dalam Penyusunan IHPS dan Penyimpanan Arsip IHPS**"
- b. Realisasi Sub IKU 10.2 Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (bobot 50%) sebesar 120%. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah



melaksanakan 6 jenis aktivitas Manajemen Pengetahuan dengan jumlah 92 (sembilan puluh dua) dengan rincian sebagai berikut.

- ✚ Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 2 aktivitas;
- ✚ Bantuan Rekan Sejawat (*Peer Assist*) sebanyak 16 aktivitas;
- ✚ Mentoring sebanyak 64 aktivitas;
- ✚ Evaluasi Pasca Kegiatan sebanyak 4 aktivitas;
- ✚ Forum Berbagi Pengetahuan sebanyak 3 aktivitas;
- ✚ Blogging sebanyak 3 aktivitas.

Jumlah aktivitas ini jika dibandingkan dengan jumlah Tahun 2021 mengalami kenaikan dikarenakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara rutin melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan di setiap triwulannya.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian IKU 10 Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 120% atau telah memenuhi target Renstra Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mempertahankan capaian IKU ini dengan melakukan aktivitas manajemen pengetahuan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

IKU 11

Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan.

IKU ini berdasarkan hasil survei pengukuran indikator yang dilaksanakan oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal.

Skala hasil survei sebagai berikut.

- ❖ 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- ❖ 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- ❖ 3,00 - 3,99 = memuaskan
- ❖ 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Perkembangan capaian IKU 11 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Realisasi	3,96	4,08	3,99	-	-
Capaian Realisasi	104,21%	107,37%	105%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	+0.12	-0,09	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	104,21%	107,37%	105%	-	-

Tabel 18 Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut, Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2022 sebesar 3,99 (**sangat memuaskan**) dari target 3,8 sehingga capaian realisasi sebesar 105%. Namun demikian, realisasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan kualitas komunikasi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemangku kepentingan.

Adapun bentuk peningkatan kualitas komunikasi tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan;
2. Melakukan standarisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial;
3. Memfasilitasi pengembangan kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, persentase realisasi IKU 11 pada Tahun 2022 dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 105% atau telah melebihi target Renstra Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

IKU 12

Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut.

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014);
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satuan Kerja baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja baru. Jika sesudah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja lama.

Perkembangan capaian IKU 12 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	-	-
Capaian Realisasi	100%	100%	100%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-	-	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	-	-

Tabel 19 Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas, realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada Tahun 2022 sebesar 100% dari target 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2022, terdapat 106 pegawai dari total 106 pegawai yang telah memenuhi standar jam pelatihan. Selama tiga tahun terakhir IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 untuk dapat memenuhi capaian IKU ini yaitu dengan melaksanakan diklat mandiri di Kantor Perwakilan dan mengikutsertakan pegawai pemeriksa maupun non pemeriksa dalam diklat di Badan Diklat secara *distance learning*. Selain itu, dilakukan monitoring secara berkala terhadap pemenuhan jam diklat pegawai.

Persentase realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Target Tahun 2024 sebesar 100%. IKU ini telah memenuhi target Tahun 2024. Dalam upaya mempertahankan pencapaian IKU 12 untuk setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berperan aktif dalam mengikutsertakan pegawai pemeriksa mengikuti diklat mandiri maupun diklat di Badan Diklat.

IKU 13

Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi adalah evaluasi tingkat kinerja untuk menghasilkan informasi kinerja atas penggunaan anggaran dalam mencapai keluaran sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021, yang diukur dengan empat variabel, yaitu.

1. Penyerapan anggaran;
2. Konsistensi antara penyerapan anggaran terhadap perencanaan;
3. Pencapaian output;
4. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Cakupan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) meliputi EKA Reguler dan EKA Nonreguler sebagai salah satu instrumen penerapan berbasis kinerja.

Pelaksanaan EKA di lingkungan BPK pada tingkatan satuan kerja baik Satker Pengelola Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Satker Pengelola DIPA, yang mengukur atas aspek implementasi dengan memperhitungkan empat variabel penilaian dengan komposisi setiap variabelnya sebagai berikut.

1. Capaian output dengan bobot 43,5%;
2. Efisiensi dengan bobot 28,6%;
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 18,2%;
4. Penyerapan anggaran dengan bobot 9,7%.

Perkembangan capaian IKU 13 Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%
Realisasi	92,62%	91,78%	91,81%	-	-
Capaian Realisasi	106,46%	104,89%	104,33%	-	-
Perubahan Realisasi (▲)	-	-0,84	+0,03	-	-
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	104,42%	103,47%	103,51%	-	-

Tabel 20 Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran pada Tahun 2022 sebesar 91,81% dari target sebesar 88% sehingga capaian realisasi sebesar 104,33%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar 86,49% atau dalam kategori **Baik**. Adapun rincian nilai tersebut sebagai berikut.

1. Penyerapan anggaran sebesar 98,70%;
Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Bobot pengukuran sebesar 9,7%.
2. Capaian Output sebesar 100%;
Capaian Output diukur dengan membandingkan antara realisasi volume Rincian Output (RO) dengan target Volume RO. Bobot pengukuran sebesar 43,5%.

3. Efisiensi sebesar 53,26%;

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi program. Bobot pengukuran 28,6%.

4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 99,89%.

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Bobot pengukuran sebesar 18,2%.

Atas nilai EKA tersebut dan untuk perbaikan kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan;
- b. Memperhatikan capaian kinerja yang telah diperoleh Tahun Anggaran (TA) 2022 sebagai evaluasi untuk meningkatkan kinerja TA 2023;
- c. Memastikan pencapaian RO TA 2022 dapat diselesaikan sesuai komitmen;
- d. Memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, waktu, sarana prasarana dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK;
- f. Melibatkan segenap pemangku kepentingan dengan bersinergi secara kolaboratif, terorganisir dan terstruktur agar dapat memberiksan masukan dalam rangka peningkatan kinerja Satuan Kerja pada periode berikutnya.

Adapun nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 99,79%. Adapun rincian nilai tersebut sebagai berikut.

- a. Revisi DIPA sebesar 100 (bobot pengukuran 10%). Nilai ini menunjukkan pengajuan revisi DIPA dalam batas kewajaran.
- b. Deviasi halaman III DIPA sebesar 100% (bobot pengukuran 10%). Nilai ini menunjukkan deviasi halaman III DIPA dalam batas toleransi.
- c. Penyerapan anggaran sebesar 99,03% (bobot pengukuran sebesar 20%). Nilai ini menunjukkan penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan target/pola ideal.
- d. Belanja kontraktual sebesar 100% (bobot pengukuran sebesar 10%). Nilai ini menunjukkan penyampaian data kontrak yang tepat waktu.
- e. Penyelesaian tagihan sebesar 100% (bobot pengukuran sebesar 10%). Nilai ini menunjukkan Penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan.
- f. Pengelolaan UP dan TUP sebesar 99,85% (bobot pengukuran sebesar 99,85%). Nilai ini menunjukkan pengelolaan UP dan TUP masih perlu dioptimalkan.

- g. Dispensasi SPM sebesar 100% (bobot pengukuran sebesar 5%). Nilai ini menunjukkan pengajuan SPM yang benar dan dalam batas waktu yang ditentukan.
- h. Capaian output sebesar 100%(bobot pengukuran 25%). Nilai ini menunjukkan pencapaian output sudah sesuai target.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkontribusi dalam upaya perbaikan atas nilai EPA ini dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, mereviu kembali rencana kegiatan dan melakukan indentifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian kinerja serta menyusun rencana aksi penanganan risiko dalam pelaksanaan anggaran;
- b. Aspek kepatuhan atas regulasi, meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, penyampaian LPJ bendahara, serta penyelesaian tagihan tepat waktu;
- c. Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM untuk menghindari retur SP2D, merealisasikan anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan triwulanan dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Pegawai;
- d. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran, ketepatan waktu dalam penyampaian perencanaan kas dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN;
- e. Memantau capaian IKPA secara berkala melalui OM SPAN, agar dapat segera melaksanakan langkah-langkah strategis peningkatan aspek kinerja;
- f. Berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN mitra kerja setempat, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 103,51% atau telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan hingga Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

C. ANALISIS EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan pencapaian strategi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Penerapan Teknologi dan Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja khususnya di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi mendukung segala aktivitas dapat dilaksanakan dengan cepat dan tentu saja dengan hasil yang baik, efektif, dan efisien.

Berikut upaya efisiensi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemanfaatan teknologi dan informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya sebagai berikut.

- a. Mengoptimalkan layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disediakan BPK. Pemanfaatan ini memberikan dampak pengelolaan administrasi dokumen lebih cepat, efektif, dan efisien. Seperti pemanfaatan aplikasi Jaringan Surat Menyurat Kedinasan (JASMIN) dimana aplikasi ini digunakan untuk mengelola surat menyurat kedinasan internal/eksternal BPK yang meliputi administrasi surat masuk, administrasi surat keluar, pendelegasian tugas dan tindak lanjut tugas. Hal ini sekaligus berdampak kepada efisiensi belanja operasional seperti pembelian ATK dan belanja pengiriman dokumen. Untuk pengiriman surat eksternal dapat memanfaatkan *e-mail* atau aplikasi pengiriman pesan pada *handphone* jika *contact person* sudah diketahui.
- b. Penggunaan media daring untuk rapat dapat mengurangi biaya jamuan rapat dan biaya operasional lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengukuran efisiensi pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan menggunakan formula pengukuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi didapat dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran efisiensi diukur atas Rincian Output (RO) yang diukur adalah Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp324.939.000,- dan nilai realisasi sebesar Rp324.712.000,- didapatkan Nilai Efisiensi atas RO ini sebesar 50,17%.

2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Asas efisiensi pengelolaan BMN yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai Batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Upaya yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam efisiensi BMN diantaranya yaitu.

- a. Mendokumentasikan dokumen secara digital. Hal ini memberikan dampak dimana pemenuhan sarana dan prasarana dapat lebih efisien dimana dapat mengurangi belanja modal untuk pembelian lemari arsip atau sejenisnya dan ruang arsip dapat lebih efisien.
- b. Pemanfaatan BMN untuk pihak ketiga untuk meningkatkan penerimaan negara.
- c. Melakukan pemindahtanganan atau penghapusan BMN yang sudah tidak lagi diperlukan untuk mengurangi biaya pemeliharaan.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengukuran efisiensi pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan menggunakan formula pengukuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi didapat dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran efisiensi diukur atas Rincian Output (RO) yang diukur adalah Layanan Sarana Internal dan Layanan Prasarana Internal dengan alokasi anggaran sebesar Rp445.495.000,- dan nilai realisasi sebesar Rp341.630.000,- didapatkan Nilai Efisiensi atas RO ini sebesar 52,22%.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia tidak hanya mengatur jumlah tenaga kerja di setiap posisi. Namun, efisiensi SDM dapat meliputi seluruh aspek kegiatan untuk meningkatkan produktivitas. Secara sederhana dapat diasumsikan jika produktivitas sumber daya manusia tinggi, maka efisiensinya juga tinggi. Sebagai contoh, penempatan pegawai sesuai kemampuan dan beban unit kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Selain itu, membuat lingkungan kerja dan ruang kerja yang nyaman dapat meningkatkan produktivitas kerja.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengukuran efisiensi pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan menggunakan formula pengukuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Nilai efisiensi didapat dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengukuran efisiensi diukur

atas Rincian Output (RO) yang diukur adalah Layanan Manajemen Internal dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) Gaji dan Tunjangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.633.659.000,- dan nilai realisasi sebesar Rp7.629.613.790,- didapatkan Nilai Efisiensi atas KRO ini sebesar 50,13%.

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. Data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam efisiensi penggunaan anggaran diantaranya yaitu.

- a. Melakukan perencanaan anggaran yang tepat guna sehingga tercapainya output yang diinginkan. Seperti penganggaran belanja modal sesuai kebutuhan.
- b. menganalisis kegiatan yang menjadi prioritas serta mendahulukan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya output.
- c. Melakukan efisiensi belanja operasional ATK dengan pemanfaatan aplikasi TIK.
- d. Melakukan efisiensi biaya konsinyering dengan melaksanakan konsinyering di Kantor.

Pengukuran efisiensi dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Tahun 2022, nilai efisiensi atas kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,26%. Nilai ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam kategori telah melakukan efisiensi terhadap pemakaian anggaran dalam rangka pencapaian keluaran sebesar 53,26%.

D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

Pada bulan Juli Tahun 2021, budaya kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan, yakni perubahan nama budaya kerja dari “MUSIK JAWA” menjadi “TANGGUH”. Perubahan nama ini merupakan pengembangan dari budaya kerja sebelumnya, sehingga budaya kerja yang sekarang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Budaya kerja “TANGGUH” merupakan singkatan dari tujuh kata yang terdiri dari (Tepercaya, Adaptif, Netral, Gesit, Guyub, Unggul, dan Harmonis), budaya kerja ini diharapkan dapat mengadaptasi Integritas, Independensi dan Profesionalisme sebagai bagian dari Nilai-Nilai Dasar dari BPK RI.

Penerapan budaya kerja “TANGGUH” dalam melaksanakan pekerjaan di lingkup pemeriksaan maupun non-pemeriksaan antara lain sebagai berikut.

No	Budaya Kerja	Perubahan mekanisme kerja/pola pikir
1	Tepercaya	Dalam bekerja senantiasa jujur sehingga memberikan rasa yakin kepada para pemilik kepentingan
2	Adaptif	Pegawai mampu menyesuaikan dengan kondisi, keadaan dan perubahan yang terjadi sehingga pekerjaan bisa dikerjakan secara optimal.
3	Netral	Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan secara objektif dan tidak memihak
4	Gesit	Dalam menangani permasalahan yang timbul, pegawai bisa cekatan dan responsif.
5	Guyub	Kerukunan dan kekompakan antar sesama pegawai selalu terjaga demi mencapai tujuan bersama
6	Unggul	Pandai dan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan
7	Harmonis	Selaras dan bekerja sama serta menjaga komunikasi yang baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal

Tabel 21 Budaya Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, diperlukan dukungan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dukungan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

No	Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output		Indikator Kinerja
			Rincian Output	Realisasi	
1			LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp3.567.990.786,-	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.
2	Rp8.555.039.000,-	Rp8.322.063.159,-	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp256.375.000,-	

No	Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output		Indikator Kinerja
			Rincian Output	Realisasi	
3			LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp2.398.472.669,-	IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
4			LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	Rp496.825.081,-	IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
5			Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	Rp352.350.670,-	IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
6			Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	Rp479.664.900,-	IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
7			Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp1.635.000,-	IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
8			Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Rp586.041.887,-	
9			Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp175.926.666,-	
10			Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp6.780.000,-	
11			Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp1.219.137.367,-	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
12			Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp324.712.000,-	IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
13			Layanan Sarana Internal	Rp395.096.130,-	IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
14			Layanan Prasarana Internal	Rp46.534.530,-	IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
15	Rp14.438.678.000,-	Rp14.384.228.238,-	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp12.398.748.211,-	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi anggaran menunjukkan realisasi anggaran RKP dan RKSP Tahun 2022. Realisasi anggaran RKP sebesar Rp8.322.063.159,- menunjukkan realisasi **Sasaran “Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas”**. Sedangkan realisasi anggaran RKSP sebesar Rp14.384.228.238,- menunjukkan realisasi **Sasaran “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan**. Total anggaran RKP dan RKSP sebesar Rp22.706.291.397,- menunjukkan realisasi **Sasaran Strategis “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”**.

F. INOVASI

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah hingga tahun 2022 mempunyai beberapa program inovasi yang menunjang capaian kinerja. Program inovasi tersebut antara lain.

1. **SIKOMPAK** (Sistem Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan) dan **PUKAT Kalteng** (Pusat Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah)

Dengan adanya dua inovasi ini, kebutuhan atas informasi dari pemangku kepentingan bisa terfasilitasi dengan lebih cepat dan tepat. Sehingga dalam capaian kinerja IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada tahun 2022 memperoleh skor 105 dikarenakan capaian kinerja pada IKU 11 melebihi dari target, berdasarkan hasil survei eksternal untuk BPK Kalteng mendapatkan indeks 3,99 dari target 3,80.

2. **SIMPATIK** (Sistem Mediasi Percepatan Aksi TLRHP secara Intensif Komprehensif)

Inovasi ini dijalankan dengan mengidentifikasi rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK yang bersifat administratif, setelah itu pemerintah daerah didorong untuk menyelesaikan temuan tersebut. Dampak dari inovasi ini, persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mengalami peningkatan. Dalam capaian kinerja IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun 2022, persentase tindak lanjut yang selesai sebesar 85,16% persentase tersebut naik 2,05% dari tahun 2021 yang sebesar 83,11%.

3. **SATPAM RUJAB** (Sistem Akses Terintegrasi Terpadu dengan Media Ruang Kerja Bersama)

Inovasi ini dibangun untuk memberikan manfaat yang memudahkan dalam penyediaan data dan bahan yang dibutuhkan sebagai bahan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan dari mana saja, serta memberikan sarana untuk monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan secara langsung walaupun pekerjaan dilakukan tidak dari kantor, sehingga dapat meningkatkan kualitas keluaran perwakilan dan mendukung pengumpulan dokumen dan data dalam menunjang capaian kinerja. Capaian kinerja yang terbantu dengan adanya Satpam Rujab antara lain IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP, IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, dan IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

4. **SI MONALISA** (Sistem Monitoring dan Analisa Aset Negara) dan **SI KLINIK** (Sistem Klinik)

Dengan adanya inovasi SI MONALISA penyajian informasi data BMN pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih akurat, Daftar Barang Ruangan (DBR) menjadi lebih *update*, setiap perubahan lokasi dan kondisi dapat dimutakhirkan secara *real time*. SIKLINIK memungkinkan Dokter dan perawat menginput pengadaan obat-obatan dan menginput data obat-obatan yang terpakai, nama pasien dan tindakan

yang dilakukan. Setelahnya data dapat ditarik oleh admin (Subbagian Umum dan TI) untuk dibuat laporan perbulan. SI MONALISA DAN SI KLINIK juga sudah menjadi *innovative practice* yang diajukan ke Direktorat PSMK, untuk SI KLINIK sudah direplikasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Capaian kinerja yang terbantu dengan adanya dua inovasi ini adalah IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, dan IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

5. **SIPENGEMBARA** (Sistem Percepatan Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Daerah terhadap Bendahara)

SIPENGEMBARA, membantu dalam pelaksanaan pemantauan Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Daerah khususnya terhadap Kerugian Daerah oleh Bendahara. Inovasi ini merupakan *embrio task force* yang akan ditetapkan oleh BPK Pusat.

Capaian kinerja yang terbantu dengan adanya inovasi ini adalah IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.

6. **SITEGAS** (Sistem Penegakan Gangguan Profesionalitas dan Integritas)

Inovasi ini memberikan kesadaran kepada pemerintah daerah dan juga pemeriksa BPK pentingnya mengutamakan Independensi, Integritas dan Profesionalisme dalam pemeriksaan. Teknis inovasi berupa pemberian kuesioner tentang Nilai-nilai dasar BPK yang disampaikan kepada entitas khususnya pejabat daerah setelah masa pemeriksaan oleh BPK berakhir.

Capaian kinerja yang terbantu dengan adanya inovasi ini adalah IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Berikut dampak inovasi dan keterkaitan dengan Indikator Kinerja disajikan dalam tabel berikut.

No	Inovasi	Dampak Inovasi	Capaian Kinerja Terkait
1	SIKOMPAK (Sistem Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan) Mendukung Pelayanan Publik	Respon terhadap masyarakat menjadi lebih cepat dan tepat	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
2	SI MONALISA (Sistem Monitoring dan Analisa Aset Negara) Mendukung Manajemen Tata Laksana	Setiap perubahan lokasi dan kondisi dapat dimutakhirkan secara <i>real time</i> .	IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran
3	SIPENGEMBARA (Sistem Percepatan Penyelesaian dan Pengembalian Kerugian Daerah terhadap Bendahara) Mendukung Pelayanan Publik	Kasus TP yang sudah penetapan sebanyak 40 kasus dari total 85 kasus, dimana pada tahun 2021 kasus TP yang sudah ditetapkan sebanyak 5 kasus dan tahun 2022 kasus TP yang sudah ditetapkan sebanyak 7 kasus.	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
4	SI KLINIK (Sistem Klinik) Mendukung Manajemen Tata Laksana dan SDM	Penatausahaan obat menjadi lebih tertib dan sudah menggunakan aplikasi. Terbentuknya <i>database</i> obat, alkes habis pakai dan rekam	IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

No	Inovasi	Dampak Inovasi	Capaian Kinerja Terkait
		medis yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan	
5	PUKAT Kalteng (Pusat Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah) Mendukung Pelayanan Publik dan Penguatan Akuntabilitas	Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi tentang BPK. Lebih banyak undangan menjadi narasumber dan menjadi guru tamu.	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
6	SATPAM RUJAB (Sistem Akses Terintegrasi Terpadu dengan Media Ruang Kerja Bersama) Mendukung Manajemen Tatalaksana & Manajemen SDM	Data dan dokumen perwakilan sudah berbentuk <i>softcopy</i> dan terpusat pada portal perwakilan, 100% sudah menggunakan portal.	IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP, IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran
7	SIMPATIK (Sistem Mediasi Percepatan Aksi TLRHP secara Intensif Komprehensif)	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah mencapai 85,17% dan terus naik.	IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
8	SITEGAS (Sistem Penegakan Gangguan Profesionalitas dan Integritas) Mendukung Pelayanan Publik	Pemda berani mengemukakan pendapat bila terjadi penyimpangan pada saat pemeriksaan. Sampai saat ini tidak ada aduan untuk tahun 2020 s.d. 2021.	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Tabel 23 Dampak Inovasi dan Keterkaitan dengan Indikator Kinerja

G. PENGHARGAAN

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga meraih capaian dan prestasi baik dari internal BPK maupun dari eksternal, disajikan dalam tabel berikut.

1. Penghargaan Internal

No.	Nama Penghargaan	Peringkat	Nama Penyelenggaran
1	Penghargaan Tim Pemeriksaa Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Terkait Lainnya dalam Penilaian Kualitas LHP Kinerja Tahun 2021 – Satker Perwakilan	2	Inspektorat Utama (Badan Pemeriksa Keuangan)
2	Penghargaan Pengelolaan Kinerja Terbaik Tahun 2021	1	Direktorat Utama Perencanaan dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Pemeriksa Keuangan)

No.	Nama Penghargaan	Peringkat	Nama Penyelenggara
3	Penghargaan Pengelolaan Pengetahuan Terbaik Tahun 2021	1	Direktorat Utama Perencanaan dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Pemeriksa Keuangan)
4	Penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik Tahun 2021	3	Sekretariat Jenderal (Badan Pemeriksa Keuangan)

2. Penghargaan Eksternal

No.	Nama Penghargaan	Peringkat	Nama Penyelenggara
1	Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Tahun Anggaran 2021 Klasifikasi Pagu Besar Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nilai 99,99 (Sangat Baik) dengan Tingkat Penyerapan Anggaran 98,85%	3	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
2	Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 Kategori Badan Publik Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah	2 (Informatif)	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
3	Penghargaan Kategori UAPPA-W Kecil atas Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan UPPA-W Tahun 2021 Mitra Kerja Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah	2	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 sebesar 100,64 atau mengalami kenaikan dari periode Tahun 2021 sebesar 100,61. Kenaikan ini menunjukkan upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan perbaikan pencapaian kinerja setiap tahunnya. Pencapaian ini menunjukkan sasaran strategis “Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi” telah tercapai.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja antara lain.

- a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
- b. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- c. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
- d. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan;
- e. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
- f. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP;
- g. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- h. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- i. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
- j. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
- k. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

Terdapat dua Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu.

- a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- b. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.



Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut antara lain, yaitu.

- a. Masih terdapatnya LHP yang masih belum akurat dan konsisten;
- b. Masih kurangnya pemahaman pegawai atas visi, misi, implementasi nilai-nilai dasar, dan kepatuhan terhadap kode etik.

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas reviu hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.
- b. meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, mengadakan coaching dan mentoring kepada pegawai, agar nilai dasar BPK bisa lebih dipahami dan dimaknai, serta mengintegrasikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.

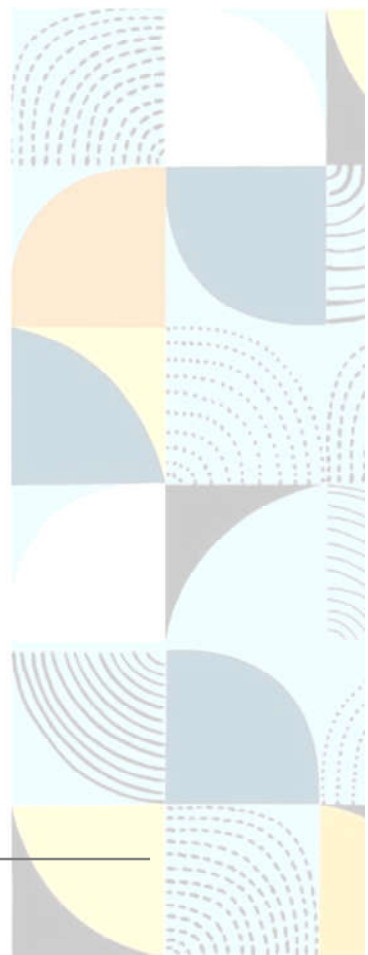
- a. Menginventarisir hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja setiap tahunnya;
- b. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja;
- c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam mendorong pencapaian kinerja dan mengatasi kendala yang dihadapi.

Penyusunan Laporan Kinerja ini semoga bermanfaat untuk perbaikan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranan BPK RI dimasa yang akan datang.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp21.464.636.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Rp8.481.655.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Pemagasan	100%
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan Rp12.982.981.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,
[Signature]
Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.

Pihak Pertama,
[Signature]
Agus Priyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Diketahui oleh:
Anggota VI BPK,
[Signature]
Nyoman Adhi Sugandhyana, S.E., M.E., CSFA.

Wakil Ketua BPK,
[Signature]
Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Ketua BPK,
[Signature]
Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA.

ESELON I
SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

ESELON II
SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

SASARAN

Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Lampiran 2

Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

No	Anggaran (setelah perubahan)	Realisasi Anggaran	Realisasi Rincian Output		Indikator Kinerja
			Rincian Output	Realisasi	
1	Rp8.555.039.000,-	Rp8.322.063.159,-	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp3.567.990.786,-	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
2			LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp256.375.000,-	
3			LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	Rp2.398.472.669,-	
4			LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	Rp496.825.081,-	
5			Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	Rp352.350.670,-	
6			Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	Rp479.664.900,-	
7			Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp1.635.000,-	
8			Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Rp586.041.887,-	
9			Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp175.926.666,-	
10			Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp6.780.000,-	
11	Rp14.438.678.000,-	Rp14.384.228.238,-	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp1.219.137.367,-	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran
12			Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp324.712.000,-	
13			Layanan Sarana Internal	Rp395.096.130,-	
14			Layanan Prasarana Internal	Rp46.534.530,-	
15			Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp12.398.748.211,-	

Tabel Target Indikator Kinerja dalam Lima Tahun Sesuai Renstra

Indikator Kinerja	Target Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	
	2020	2021	2022	2023	2024			
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	90,63%	90,63%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	85,16%	113,55%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,90%	100,90%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100,14%	100,14%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,46%	100,46%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,45	89%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	AA (94,09)	104,49%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	98,95%	98,95%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,99	105%
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	91,81%	103,51%

Lampiran 4

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target Tahun 2022 (3)	Realisasi			
			Tahun 2022 (4)	Tahun 2021 (5)	Tahun 2020 (6)	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	90,63%	90,63%	86,67%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,16%	83,11%	85,32%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,90%	100,38%	100,89%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100,14%	100%	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,46%	100,39%	100%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,45)	Sangat Memuaskan (4,40)	Sangat Memuaskan (4,42)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (94,09)	AA (96,59)	AA (94,39)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	98,95%	99,66%	99,16%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	120%	170,83%	200%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,99)	Sangat Memuaskan (4,08)	Memuaskan (3,96)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%	91,81%	91,78%	92,62%

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun : 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I Tahun 2022 sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); Pembentukan Tim Perencanaan Pemeriksaan LKPD; Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I Tahun 2022. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 15 entitas dan pemeriksaan kinerja LKPD;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan <i>cross review</i> atas pemeriksaan Semester I untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi LHP yang diterbitkan; Melaksanakan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan Semester I sesuai pedoman yang berlaku dan melakukan penyimpanan secara elektronik; Pembentukan Tim revidi Opini untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan opini BPK atas LK entitas; Pembentukan Tim revidi infrastruktur untuk meningkatkan kualitas temuan terkait konstruksi.
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II; Pelaksanaan KTF dengan tema yang berkaitan dengan pemeriksaan Semester II.
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Kinerja dan DTT Semester II; Melaksanakan <i>cross review</i> atas pemeriksaan Semester II untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi LHP yang diterbitkan; Melaksanakan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan Semester II sesuai pedoman yang berlaku dan melakukan penyimpanan secara elektronik.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2022; Melakukan sinkronisasi tujuan pemeriksaan dengan harapan penugasan atas pemeriksaan Semester I Tahun 2022;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
	Memenuhi Harapan Penugasan							<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2022; Melakukan sinkronisasi tujuan pemeriksaan dengan harapan penugasan atas pemeriksaan LKPD TA 2021 dan Kinerja LFAR; Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan; Menyusun kesimpulan pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan/harapan penugasan; Pembentukan Tim reviu Opini untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan opini BPK atas LK entitas; Pembentukan Tim reviu infrastruktur untuk meningkatkan kualitas temuan terkait konstruksi. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan sinkronisasi tujuan pemeriksaan dengan harapan penugasan atas pemeriksaan Semester II Tahun 2022; Merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kesimpulan pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan/harapan penugasan; Pembentukan Tim reviu infrastruktur untuk meningkatkan kualitas temuan terkait konstruksi.
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL; Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
	Hasil Pemeriksaan							<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS); • Melakukan komunikasi dengan <i>auditee</i> untuk pemutakhiran penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong entitas agar segera melakukan penyelesaian rekomendasi BPK dengan melakukan penginputan melalui aplikasi SIPTL; • Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester I Tahun 2022 dengan mengundang entitas baik secara <i>online</i> atau <i>offline</i> dan melakukan verifikasi dan validasi dokumen TL melalui SIPTL. • Penyusunan <i>action plan</i> atas LHP Sem I yang disertai dengan informasi dokumen TL agar rekomendasi dapat dikategorikan sesuai . <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan komunikasi dengan <i>auditee</i> untuk pemutakhiran penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong entitas agar segera melakukan penyelesaian rekomendasi BPK dengan melakukan penginputan melalui aplikasi SIPTL; • Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester II Tahun 2022 dengan mengundang entitas baik secara <i>online</i> atau <i>offline</i> dan melakukan verifikasi dan validasi dokumen TL melalui SIPTL; • Penyusunan <i>action plan</i> atas LHP Sem I yang disertai dengan informasi dokumen TL agar rekomendasi dapat dikategorikan sesuai.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
	Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional							<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional yang ditetapkan BPK. Triwulan II: Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan. Triwulan III: Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan tematik nasional dengan memperhatikan jumlah SDM Perwakilan. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik nasional; Menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan tematik nasional.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan; Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan; Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan; Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan sesuai permintaan tersebut jika topik pemeriksaan cukup signifikan; Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	0%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal; Menyusun rencana pemeriksaan sesuai dengan tematik lokal yang ditetapkan. Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan; Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal. Triwulan III: Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan tematik lokal. Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan terinci tematik lokal; Menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD; Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP; Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD dan terinci kinerja LFAR; • Melaksanakan pengarahan Kepala Perwakilan sebelum pemeriksaan terinci LKPD dan terinci kinerja LFAR <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terkait IIP; • Melakukan sosialisasi layanan aplikasi <i>live chat</i> sebagai sarana pengaduan <i>stakeholders</i> terhadap nilai IIP Pemeriksa. <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	A (88,00)	A (88,00)	Desember	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022; • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku. <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi; • Melengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk penilaian SAKIP Tahun 2021. <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku; • Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi. <p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	25%	50%	75%	97%	Desember	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol, portal); Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan; Menginventarisir masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut; Mengkomunikasin masalah yang dihadapi dengan Biro TI. <p>Triwulan II.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol, portal); Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan; Menginventarisir masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut; Mengkomunikasin masalah yang dihadapi dengan Biro TI. <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol, portal); Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan; Menginventarisir masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Mengkomunikasikan masalah yang dihadapi dengan Biro TI.
								<p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol, portal); Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan; Menginventarisir masalah pemanfaatan TI yang dihadapi pegawai dan melakukan pendampingan atau sosialisasi pemanfaatan TI tersebut; Mengomunikasikan masalah yang dihadapi dengan Biro TI.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	12,5% (1 Aktivitas MP)	25% (1 Aktivitas MP)	37,5% (1 Aktivitas MP)	100% (1 Aktivitas MP, 1 Usulan BP)	Desember	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2021; Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan diklat; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan bantuan rekan sejawat (<i>peer assist</i>); Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan revidu pasca aktivitas (<i>after action review</i>). <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan revidu pasca aktivitas (<i>after action review</i>); Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan Wawancara berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based interview</i>); Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan <i>Mentoring</i>. <p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan bantuan rekan sejawat (<i>peer assist</i>); Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan <i>Coaching</i>; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan Forum Berbagi Pengetahuan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan Forum Berbagi Pengetahuan; Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan reviu pasca aktivitas (<i>after action review</i>).
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat <i>entry briefing</i>; Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak <i>auditee</i>; Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat <i>entry briefing</i>; Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak <i>auditee</i>; Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I			TW II			TW III			TW IV			(8)	(9)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																<ul style="list-style-type: none"> Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat <i>entry briefing</i>; Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak <i>auditee</i>; Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti.
																<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; Mengomunikasikan tujuan dan cakupan pemeriksaan pada saat <i>entry briefing</i>; Menyampaikan lebih awal setiap temuan pemeriksaan dan mendiskusikan dengan pihak <i>auditee</i>; Mengundang para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengomunikasikan rekomendasi pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	50%	50%	50%	65%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	90%	100%	Desember	<p>Januari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Mengajukan proposal penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan LKPD TA 2021 pada Kantor Perwakilan; Melaksanakan pelatihan pemeriksaan LKPD TA 2021 pada Kantor Perwakilan; Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan LKPD TA 2021 pada Kantor Perwakilan; Menginventarisasi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai; <p>Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja										Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I		TW II		TW III		TW IV		(8)	(9)		
													<ul style="list-style-type: none"> Menginventarisi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. <p>Maret :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan pra penugasan KAP untuk pemeriksaan LKPD (<i>off class</i>); Menginventarisi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai; Menyusun laporan monitoring jam diklat pegawai Triwulan I Tahun 2022. <p>April :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menginventarisi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. <p>Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menginventarisi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. <p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menginventarisi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai; Menyusun laporan monitoring jam diklat pegawai Triwulan II Tahun 2022. <p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menginventarisi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai; 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja								Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I		TW II		TW III		TW IV		(8)	(9)
												<p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menginventarisasi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.; Menginventarisasi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai; Menyusun laporan monitoring jam diklat pegawai Triwulan III Tahun 2022. <p>Oktober :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menyusun analisis kebutuhan pembelajaran Tahun 2023; Menginventarisasi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. <p>November :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan keikutsertaan pegawai dalam kegiatan diklat sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; Menginventarisasi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. <p>Desember :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi tingkat pemenuhan jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai; Menyusun laporan monitoring jam diklat pegawai Triwulan IV Tahun 2022.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja; Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan; 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah; Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK; Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja satker dengan Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA. 2021 dan Kebijakan TA.2021. <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja; Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan; Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah; Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK; Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja satker dengan Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA. 2021 dan Kebijakan TA.2021. <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja; Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan; Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK; Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja satker dengan Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA. 2021 dan Kebijakan TA.2021. <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran dan kinerja; Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan; Menyusun data capaian output dan memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah; Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK. Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja satker dengan Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA. 2021 dan Kebijakan TA.2021.

Keterangan:

- Kolom (1) : *Diisi dengan nomor urut IKU Unit/Satuan Kerja.*
- Kolom (2) : *Diisi dengan nomenklatur IKU Unit/Satuan Kerja.*
- Kolom (3) : *Diisi dengan Target Tahun 2022*
- Kolom (4) s.d. (7) : *Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis unit/satuan kerja dan juga target tahunan.*
- Kolom (8) : *Diisi dengan rencana waktu penyelesaian.*
- Kolom (9) : *Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja.*

Rencana kegiatan merupakan langkah-langkah dari unit/satuan kerja yang disusun secara rinci dan lengkap pada triwulan I, II, III dan IV. Unit/satuan kerja diharapkan dapat menggambarkan upaya-upaya yang akan dilakukan melalui rencana kegiatannya tersebut agar pada akhir tahun pencapaian kinerja dapat tercapai.

Khusus untuk IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, mohon mencantumkan jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang akan direncanakan setiap triwulan (minimal empat jenis aktivitas manajemen pengetahuan yang berbeda selama Tahun 2022).